



# PENGUMUMAN LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA

(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 28 Maret 2023/Periodik - 2022)

BIDANG : EKSEKUTIF

LEMBAGA : KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI

UNIT KERJA : INSTITUT PERTANIAN BOGOR

I. DATA PRIBADI

Nama : JAENAL EFFENDI
 Jabatan : KEPALA BADAN

3. NHK : **691221** 

## II. DATA HARTA

### A. TANAH DAN BANGUNAN

Rp. 6.495.000.000

- Tanah dan Bangunan Seluas 184 m2/140 m2 di KAB / KOTA KOTA BOGOR , HASIL SENDIRI Rp. 350.000.000
- Tanah dan Bangunan Seluas 580 m2/580 m2 di KAB / KOTA BOGOR, HASIL SENDIRI Rp. 2.500.000.000
- Tanah dan Bangunan Seluas 62 m2/62 m2 di KAB / KOTA BOGOR,
   HASIL SENDIRI Rp. 175.000.000
- 4. Tanah dan Bangunan Seluas 250 m2/176 m2 di KAB / KOTA PASURUAN, WARISAN Rp. 500.000.000
- 5. Tanah Seluas 4000 m2 di KAB / KOTA BOGOR, HASIL SENDIRI Rp. 190.000.000
- 6. Tanah Seluas 2800 m2 di KAB / KOTA BOGOR, HASIL SENDIRI Rp. 220.000.000
- Tanah Seluas 754 m2 di KAB / KOTA BOGOR, HASIL SENDIRI
   Rp. 150.000.000
- Tanah Seluas 800 m2 di KAB / KOTA BOGOR, HASIL SENDIRI Rp. 75.000.000
- Tanah Seluas 3900 m2 di KAB / KOTA BOGOR, HASIL SENDIRI Rp. 435.000.000
- Tanah dan Bangunan Seluas 1020 m2/320 m2 di KAB / KOTA BOGOR, HASIL SENDIRI Rp. 1.900.000.000

### B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN

кр.

350.000.000





1. MOBIL, TOYOTA FORTUNER Tahun 2016, HASIL SENDIRI Rp. 350,000,000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	58.000.000
D. SURAT BERHARGA	Rp.	Kerry
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	88.324.301
F. HARTA LAINNYA	Rp.	KPK KPK
Sub Total	Rp.	6.991.324.301
III. HUTANG	Rp.	2.245.000.000
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	4.746.324.301

#### Catatan:

- 1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari <a href="elhkpn.kpk.go.id">elhkpn.kpk.go.id</a>. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui <a href="elhkpn.kpk.go.id">elhkpn.kpk.go.id</a>, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
- 3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.